

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengkaji atau melihat adanya kekaburan norma hukum tentang kewenangan penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak sebagai dasar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila adanya ketidak selerasan antara instansi pajak dalam penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak dan Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak.

Mengingat kewenangan penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah didelegasikan ke pemerintah daerah yang mana sebelumnya dari pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pembangunan dan peningkatan perekonomian dari pemerintah daerah.

Kata Kunci : Nilai Perolehan Objek Pajak, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

The purpose of this paper is to review and view the existence of legal norms regarding the determination of the Value of Tax Object Acquisition as a basis for Customs and Land Acquisition Customs as well as the legal consequences that arise when there is disagreement between tax agencies in determining Tax Object Acquisition Value and Legal Effect taxable.

Considering the authority to establish Customs and Land Acquisition Customs has been delegated to the previous local government by the central government. This is aimed at enhancing the independence of the economy and enhancing the economy of the local government.

Keywords: Tax Object Acquisition Value, Land and Building Rights Acquisition Charge, Local Government